

TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK MENURUT PENGETAHUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN BANTEN KIDUL

Oleh:

Devi Al Irsyadiah¹ dan San Afri Awang²

INTISARI

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts 8211/11/1997. Di dalam kawasan ini telah menetap masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul (KBK) ratusan tahun lamanya. Dalam pengelolaan TNGHS, ternyata masih selalu ada perbedaan tujuan dan kepentingan antara pengelola dan masyarakat adat KBK. Hal ini menimbulkan konflik meskipun hanya terselubung dan tidak muncul ke permukaan, namun jika berlangsung terus menerus maka akan menjadi konflik besar yang berbahaya bagi pengelolaan hutan. Perbedaan ini disebabkan karena dari kedua belah pihak memiliki pengetahuan dan latar belakang perolehan pengetahuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan memaknai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat KBK, kemudian membahas perbedaannya dengan pengetahuan pemerintah yang terwujud dalam bentuk kebijakan-kebijakannya.

Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi, teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Data yang diambil adalah mengenai realitas sosial masyarakat yang telah dikonstruksi melalui tiga momen dialektis yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Analisis yang dilakukan adalah dengan reduksi fenomenologis, pemaknaan, dan kemudian mendeskripsikan secara sistematis.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perbedaan pengetahuan antara pihak pengelola dan masyarakat adat KBK berbeda nyata. Hal ini terwujud dalam sistem zonasi yang berlainan fungsi dan tujuan dari kedua belah pihak. Masyarakat lebih mengenal istilah *Leuweung Tutupan*, *Leuweung Titipan*, dan *Leuweung Garapan* daripada istilah zonasi-zonasi yang dikonstruksikan oleh Taman Nasional. Penerapan sistem pengelolaan TNGHS oleh pemerintah terhadap masyarakat adat KBK cenderung merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan penguasaan pikiran. Namun perbedaan ini dapat diminimalisir dengan penyesuaian yang berlangsung terus-menerus antara makna satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses interaksi intersubjektif di antara keduanya.

Kata Kunci: eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, pengetahuan, konstruksi sosial, sistem zonasi hutan

¹ Mahasiswa Jurusan Manajemen Hutan FKT UGM, NIM: 99/127041/KT/04250

² Staff Pengajar FKT UGM